

**Studi Dimensi *Systemness* dan Dimensi *Reification*  
dalam Pelembagaan Partai Persatuan Pembangunan (PPP)  
Kabupaten Tasikmalaya Pasca Reformasi**

Oleh :

**Subhan Agung<sup>1</sup>  
Hendra Gunawan<sup>2</sup>**

**Abstraksi**

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana institusionalisasi kepartaian yang dilakukan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Tasikmalaya pasca Reformasi. Penelitian ini dasari dari realitas politik di mana terdapat dominasi yang signifikan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) baik dalam eksekutif maupun legislatif dalam politik lokal di Kabupaten Tasikmalaya. Realitas politik tersebut tentunya bukanlah dicapai dengan sesuatu yang tanpa upaya yang terencana (*by design*), namun membutuhkan upaya institusionalisasi kepartaian yang memadai dari eli-elit partai tersebut. Penelitian ini akan berusaha mengungkap upaya institusionalisasi tersebut lewat kajian penelitian secara kualitatif deskriptif.

Metode penelitian kualitatif deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini di *cover* dengan pendekatan ilmu politik institusionalisme. Pendekatan ini memiliki kharakter kajian yang cenderung lebih memprioritaskan dimensi kelembagaan dalam mempengaruhi proses-proses politik dalam *field* politik tertentu. Sedangkan tehnik analisis menggunakan metode interaktif dan data digali secara mendalam lewat syarat utama pengetahuan informan akan fokus penelitian (*purpose methode*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi *systemness* PPP cukup mapan dengan menjadikan peraturan-peraturan internal partai sebagai pedoman dalam menyelesaikan berbagai problem internal kepartaian. Selama ini PPP cukup berhasil membentuk dan menginternalisasi aturan-aturan tersebut dalam tingkah laku dan sikap kepartaian. Fungsi-fungsi kepartaian relatif berjalan walaupun belum cukup ideal. Sedangkan tentang Reifikasi kepartaian PPP menggunakan strategi pencitraan lewat pesantren, identifikasi partainya Nahdiyyin, pencitraan lewat lembaga politik dan mencitrakan diri sebagai partainya para ulama. Kedua dimensi tersebut secara akseleratif melahirkan PPP sebagai penguasa politik lokal di Kabupaten Tasikmalaya.

---

<sup>1</sup> Dapat dihubungi melalui surel [asubhan0711@yahoo.co.id](mailto:asubhan0711@yahoo.co.id) atau [subhanagung@unsil.ac.id](mailto:subhanagung@unsil.ac.id)

<sup>2</sup> Dapat dihubungi melalui surel [hendragunawan@unsil.ac.id](mailto:hendragunawan@unsil.ac.id)

## **Abstract**

This study aims to determine how the institutionalization of the party that carried out by Partai Persatuan Pembangunan (PPP) post-Reformation in Tasikmalaya District. This study of the underlying political reality in which there is a significant dominance of Partai Persatuan Pembangunan (PPP), both in the executive and legislative branches in local politics in Tasikmalaya district. The political reality of course is not achieved anything without a planned effort (by design), but requires adequate efforts of party institutionalization of eli-party elite.

This study will attempt to uncover the institutionalization efforts through a descriptive qualitative research studies. Descriptive qualitative research methods used in this study on the cover of the political science approach institutionalism. This approach has karakter studies which tend to be more im- institutional dimension to influence political processes in certain political field. While analysis approach using interactive methods and data is explored in depth through the main requirement will be the focus of research knowledge informants (purpose method).

The results showed that the dimensions of well-established PPP systemness by making internal party rules as guidance in resolving the internal problems of the party. During PPP quite successfully establish and internalize these rules in behavior party. Functions relatively walking party, although not quite ideal. As for the PPP party Reification using imaging strategies through boarding, as Nahdiyyin party identification, imaging through political institutions and portray themselves as the party of the scholars. The second dimension is accelerating childbirth PPP as the local political authorities in Tasikmalaya district.

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Penelitian ini akan mengkaji tentang proses pelebagaian (institusionalisasi) kepartaian pada salah satu partai Islam di Indonesia. Fokus penelitian ini adalah *concern* terhadap dimensi *systemness* dan citra publik (*reification*) dalam model institusionalisasi kepartaian Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Tasikmalaya pasca Reformasi.

Kajian ini diambil berdasarkan pada fenomena dan realitas politik bahwa Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya khususnya Pasca Reformasi sampai saat ini telah berhasil mewujudkan tatanan kepartaian sebagai partai penguasa. Dominasi Partai Persatuan Pembangunan—selanjutnya disingkat PPP tidak hanya menguasai kursi legislatif di Kabupaten Tasikmalaya, namun juga kursi eksekutif. Penguasaan tersebut tentunya berbanding terbalik dengan dinamika yang terjadi secara nasional, dimana PPP menjadi partai menengah yang dominasinya tidak terlalu “mentereng” dalam perpolitikan secara umum.

Dominasi PPP dalam eksekutif terbukti dengan memenangkan Pemilihan Bupati oleh DPRD yang memenangkan Tatang Farhanul Hakim di tahun 2001, kemenangan tersebut terulang dalam Pemilukada Langsung tahun 2006 yang memenangkan incumbent, sampai yang terakhir adalah kemenangan UU Ruzhanul Ulum dalam Pemilukada Langsung tahun 2011. Selain dominasi dalam eksekutif juga PPP mendominasi peraihan kursi DPRD secara konsisten sejak Pasca Reformasi sampai sekarang. Pada Pemilukada 2004 PPP Kabupaten Tasikmalaya

meraih kursi sebanyak 11, tahun 2009 mendapat 14 kursi Parlemen dan tahun 2014 mendapat 9 kursi. Perolehan tersebut merupakan suara tertinggi menyisihkan partai dominan lainnya yakni PKB 8 Kursi, PDI-P 8 Kursi dan Golkar 7 Kursi.

Melihat data di atas, tidak diragukan lagi PPP Kabupaten Tasikmalaya merupakan partai penguasa yang sangat mendominasi dalam perpolitikan local Tasikmalaya. Hal ini tentunya tidak terjadi begitu saja, namun ada banyak hal yang mempengaruhi keberhasilan PPP dalam mengontrol politik lokal di Tasikmalaya. Hal tersebut bisa saja dipengaruhi oleh sosio-kultural masyarakat, historisitas kepartaian, institusionalisasi yang dibangun dan banyak lagi.

Dari fenomena dan fakta politik di atas, kajian ini akan mengkhususkan kajian pada factor institusionalisasi kepartaian yang sengaja dibangun oleh PPP Kabupaten Tasikmalaya dalam mempertahankan dominasi yang selama ini dicapai. Pertimbangan kajian ini diambil dengan dasar bahwa tidak mungkin PPP dapat eksis sejauh ini bahkan menjadi partai penguasa jika tidak melakukan institusionalisasi kepartaian yang memadai.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah dimensi systemness dan dimensi reification dalam pelembagaan kepartaian yang dilakukan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Tasikmalaya sehingga mampu mempertahankan dominasinya dalam perpolitikan lokal di Kabupaten Tasikmalaya ?.

### 1.3. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan memfokuskan kajian pada dua model institusionalisasi kepartaian menurut ilmuwan politik Randall dan Svasand dari 4 model yang ada. Kajian 2 model dari 4 model tersebut dilakukan karena keterbatasan sumber daya yang ada, karena mengkaji 4 model tersebut tidaklah sederhana membutuhkan waktu yang luang karena harus melengkapi kajian-kajian literatur yang lebih mendalam terkait dengan dua dimensi lainnya yang menjadi keterbatasan peneliti saat ini. Namun walaupun demikian, peneliti memilih dua dimensi tersebut diyakini nantinya dapat memahami baik secara internal maupun secara eksternal kondisi pelebagaan kepartaian PPP, sehingga secara kualitas dapat dipertanggungjawabkan validitas penelitian ini. Untuk mengkaji dua dimensi lainnya akan dilakukan dalam penelitian lanjutan nantinya yang merupakan bagian *road map* penelitian kami. Dari penjelasan di atas, peneliti akan lebih focus mengkaji dimensi *systemness* dan citra publik (*reification*) PPP di Kabupaten Tasikmalaya dari mulai Reformasi sampai sekarang.

## **BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. *State of The Art***

#### **2.1.1. Teori Institusionalisasi Kepartaian**

Kajian teoritis yang akan digunakan dalam menggambarkan *reification* partai Golkar ini adalah bersumber dari kajiannya Randall dan Svasand<sup>3</sup>. Dua pemikir ini sebelumnya melihat dari kajian-kajian institusionalisasi kepartaian Selznick (1957) Huntington (1968), Kenneth Janda (1980), Panebianco (1988) dan terbaru Levitsky (1998). Keduanya menggunakan istilah-istilah yang oleh ilmuwan-ilmuwan di atas pernah dipakai dalam bentuk kajian metriks yang unik. Model ini mereka gunakan untuk mengkaji institusionalisasi kepartaian di Dunia Ketiga seperti misalnya Argentina, Malaysia termasuk Indonesia. Model metriks Randall dan Svasand ini juga digunakan Akbar Tandjung (2007)<sup>4</sup> sebagai kerangka teoritik dalam membaca institusionalisasi Partai Golkar pasca jatuhnya Soeharto dan juga yang terbaru dipakai oleh Tomsa yang juga sama untuk membaca institusionalisasi Partai Golkar Pasca Soeharto (2008)<sup>5</sup>.

---

<sup>3</sup> Vicky Randall dan Lars Svasand (2002), *Party Institutionalization in New Democracies, Party Politics*, Vol.8 No.1, Sage Publication, London, hal 5-29, atau didownload di <http://ppq.sagepub.com>.

<sup>4</sup>Lihat dalam Akbar Tandjung, 2007, *The Golkar Way : Survival Partai Golkar dalam Turbulensi Politik Era Transisi*, Gramedia, Jakarta.

<sup>5</sup>Lihat dalam Dirk Tomsa (2008), *Party Politics and Democratization in Indonesia : Golkar in The Post- Soeharto Era*, Routledge, London and Newyork.

### 2.1.2. Dimensi-Dimensi Institusionalisasi Partai

Pelebagaan partai politik dalam Randall dan Svasand<sup>6</sup> adalah proses pemantapan partai politik baik secara struktural dalam rangka mempolakan perilaku maupun secara kultural dalam mempolakan sikap dan budaya (*the process by which the party becomes established in terms of both integrated patterns on behavior and of attitudes and culture*). Proses pelembagaan ini mengandung dua aspek, yaitu aspek internal-eksternal dan aspek struktural-kultural. Bila kedua dimensi ini dipersilangkan, maka akan tampak sebuah tabel empat sel, yaitu; *pertama*, dimensi kesisteman (*systemness*) suatu partai sebagai hasil persilangan aspek internal dengan struktural. *Kedua*, dimensi identitas nilai (*value infusion*) suatu partai sebagai hasil persilangan aspek internal dengan kultural. *Ketiga*, dimensi otonomi suatu partai dalam pembuatan keputusan (*decisional autonomy*) sebagai hasil persilangan aspek eksternal-struktural. *Keempat*, dimensi pengetahuan atau citra publik (*reification*) terhadap suatu partai politik sebagai persilangan aspek eksternal-kultural.

<b>Dimensi Kepartaian</b>	<b>Internal</b>	<b>Eksternal</b>
<b>Struktural</b>	Kesisteman	Otonomi
<b>Kultural</b>	Identitas Nilai	Citra pada Publik

Sumber : Randall-Svasand (2002 :13).

**Gambar 1. Metriks Dimensi-Dimensi Institusionalisasi Kepartaian**

---

<sup>6</sup> Ibid, hal.11

*Pertama*, dimensi kesisteman adalah proses pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik, termasuk penyelesaian konflik, dilakukan menurut aturan, persyaratan, prosedur dan mekanisme yang disepakati dan ditetapkan dalam AD/ART partai politik. *Kedua*, dimensi identitas nilai ini berkaitan dengan identitas partai politik berdasarkan ideologi atau *platform* partai dan karena itu berdasarkan basis sosial pendukungnya dan identifikasi anggota terhadap pola dan arah perjuangan yang diperjuangkan partai politik tersebut. *Ketiga*, dimensi otonomi suatu partai politik dalam pembuatan keputusan berkaitan dengan hubungan partai dengan aktor luar partai, baik dengan sumber otoritas tertentu (penguasa, pemerintah), maupun dengan sumber dana (pengusaha, penguasa, negara atau lembaga luar) dan sumber dukungan massa (organisasi masyarakat). *Keempat*, dimensi pengetahuan publik tentang partai politik, merujuk pada pertanyaan apakah keberadaan partai politik tersebut telah tertanam pada imajinasi publik dan bagaimana pihak lain menyesuaikan dengan visi-misinya<sup>7</sup>.

Dari tulisan di atas, terpetakanlah dalam ranah mana penulis memfokuskan kajian, yakni memfokuskan pada salah satu dimensi pelembagaan partai politik yaitu pembangunan citra partai politik (*reification*). Hal inilah yang akan dikaji kemudian dalam konteks Partai Golkar masa kepemimpinan Akbar Tandjung. Kajian dimensi yang lain jika ada hanya sebagai pelengkap argumen, jika hal tersebut berkaitan dengan citra partai ke publik. Hal ini dimungkinkan terjadi, karena pada dasarnya metrik Randall dan Svasand ini *include* antara satu dimensi dengan dimensi lainnya.

---

<sup>7</sup>Ibid, hal. 10-11

### 2.1.3. Konsep *Reification* Kepartaian

Sebagai mana dibahas di atas, *reification* merupakan salah satu dimensi dalam kajian institusionalisasi kepartaian. *Reification* maksudnya adalah bagaimana partai mampu memberikan citra ke publik yang mampu mengangkat nilai kesetiaan konstituen dalam memberikan dukungannya. Selain itu juga bagaimana partai mampu menjelmakan institusinya sebagai institusi yang memiliki nilai positif dan membawa *impact* positif dalam mendapatkan pilihan konstituen sebanyak-banyaknya.

Derajat pengetahuan publik tentang partai politik merujuk pada pertanyaan apakah keberadaan partai politik tersebut telah tertanam pada imajinasi publik. Bila keberadaan partai politik tertentu telah tertanam pada imajinasi publik, maka pihak lain baik para individu maupun lembaga akan menyesuaikan aspirasi dan harapan ataupun sikap dan perilaku mereka dengan keberadaan partai politik tersebut. Derajat pengetahuan publik ini merupakan fungsi dari waktu dan kiprah partai tersebut.

Konsep citra terkait dengan imajinasi publik terhadap partai tertentu yang berdasar dari fakta dan informasi yang ada akan eksistensi partai tertentu. Dalam konteks ini reifikasi akan banyak bicara politik simbol yang dimainkan partai, *flat-form* partai yang populis dan implementasi *flat-form* yang masif.

Kajian tentang *reification* Golkar pasca jatuhnya Soeharto pada masa kepemimpinan Akbar Tandjung ini akan menggunakan kerangka kajian seperti yang dijelaskan di atas, yang meliputi : *pertama*, upaya perubahan atribut dan simbol-simbol Golkar sebagai partai penguasa dan anti-demokrasi lewat ulasan

tentang politik simbol. *Kedua*, imaji tersebut tidak hanya sekedar tertanam, namun juga menjadi penggerak untuk bersepaham dengan *flatform* dan kultur politik Golkar dengan menjadi bagian dari konstituennya yang diulas lewat penataan internal partai yang berdampak pada citra partai ke publik. *Ketiga*, citra publik yang maksimum akan terbentuk ketika *flatform* partai tersebut dimanifestasikan dalam berbagai kebijakan yang menyesuaikan dengan kehendak konstituen, baik di parlemen, eksekutif atau lembaga politik lainnya yang akan dibahas dalam pencitraan lewat kebijakan yang populis.

## **2.2. Penelitian Terdahulu**

Kajian ini diilhami oleh kajian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Randall dan Svasand pada tahun 2002 dalam studinya tentang Institusionalisasi Kepartaian di Negara Demokrasi Baru (Negara yang sedang berkembang). Kerangka teoritik yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengambil dari kerangka teoritik yang dikembangkan oleh Randall dan Svasand tersebut tentang metric 4 dimensi institusionalisasi kepartaian seperti yang telah diulas dalam kajian teoritik di atas<sup>8</sup>.

Kajian lainnya yang pernah dilakukan dan menggunakan konsep metrika Randall dan Svasand ini adalah kajiannya Dirk Tomsa tentang kajian institusionalisasi kepartaian Golkar pasca Soeharto di tahun 2008, sebelumnya Akbar Tanjung juga melakukan penelitian tentang institusionalisasi kepartaian menggunakan kerangka teoritik dari Svasand ini di tahun 2007 yang melahirkan

---

<sup>8</sup> Randall dan Svasand (2002)

buku fenomenal yakni *The Golkar Way : Survival Partai Golkar dalam Turbulensi Politik Masa Transisi*. Pada dasarnya ketika menggunakan frame konsep ini selalu tulisan yang berusaha dikembangkan oleh para peneliti adalah bagaimana partai-partai tersebut bangkit dari keterpurukan, atau berusaha menemukan kembali kebesarannya yang pernah ada. Munculnya penelitian-penelitian ini khususnya di Indonesia disebabkan saat itu konteksnya kejatuhan Golkar yang banyak dicerca oleh masyarakat pasca Reformasi dan kejatuhan Orde Baru.

Relevansi penelitian yang akan dilakukan saat ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah fenomena menguatnya Partai Persatuan Pembangunan di lokal Tasikmalaya. Hal ini tentu saja menarik untuk dikaji lebih lanjut dan tentunya akan sangat berbeda kajiannya jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah ada. Dengan konsep yang tidak berbeda jauh, tetapi konteks, sejarah, dan perkembangan PPP yang unik, khususnya di Kabupaten Tasikmalaya diharapkan akan menghasilkan kajian baru yang menambah temuan ilmiah, baik untuk studi lain, maupun untuk studi lanjutan di masa yang akan datang.

## **BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### **3.1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dimensi *systemness* dan reifikasi dalam model pelebagaan yang dilakukan oleh PPP Kabupaten Tasikmalaya sehingga mampu *survive* dalam perpolitikan lokal. Hal ini dapat menjadi pengembangan untuk diterapkan di institusi lainnya.

### **3.2. Manfaat Penelitian**

Akademis, untuk menambah *khazanah* ilmu sosial-politik khususnya bidang kajian partai politik dan system pemilu yang menjadi salah satu kajian wajib di Program Studi Ilmu Politik, ke depannya hasil penelitian ini dapat dimasukan dalam materi kajian mata kuliah tersebut dan dibuat modul hasil penelitiannya.

Praktis, dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak terkait dalam memahami survivalitas sebuah partai politik, tumbuh dan berkembangnya partai, dan juga model pengelolaan partai politik, baik nasional maupun lokal. Target penelitian ini adalah menjadikan penelitian yang bermanfaat, dengan analisis dan kajian yang mendalam, namun memiliki manfaat besar baik secara akademis maupun secara praktis sebagaimana yang diharapkan dalam kegunaan penelitian ini

## **BAB 4. METODE PENELITIAN**

### **4.1. Objek Penelitian**

Adapun yang menjadi sasaran penelitian ini adalah elit-elit politik (tokoh dan pimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Tasikmalaya, mantan bupati dan Bupati Tasikmalaya dari PPP. Untuk pembanding juga ditambah informan dari konstituen PPP yang dianggap mewakili, dan Parpol dan d Kabupaten Tasikmalaya yang selama ini berinteraksi dalam perpolitik lokal Tasikmalaya

### **4.2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah di Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Tasikmalaya.

### **4.3. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Secara teknis metode penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif seperti ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang yang menjadi subyek penelitian. Pendekatan ini langsung menunjuk *setting* dan individu-individu dalam *setting* itu secara keseluruhan, subyek penelitian baik berupa kelompok, organisasi ataupun

individu itu sendiri. Ini tidak akan dipersempit menjadi variabel terpisah atau hipotesis, melainkan dipandang secara keseluruhan.

Dalam model penelitian ini, peneliti mencoba menggali fakta di lapangan dari fenomena yang diteliti, yang kemudian dianalisis dengan analisa deskriptif. Dalam penelitian deskriptif, peneliti tidak melakukan uji terhadap hipotesis seperti lazimnya yang dilakukan pada penelitian kuantitatif, tetapi memberikan gambaran secara deskriptif berdasarkan temuan-temuan yang muncul di lapangan dengan didukung oleh data yang diperoleh.

#### **4.4. Sumber Data**

Adapun sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- **Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari nara sumber, baik responden maupun informan, melalui wawancara atau dengan penggunaan daftar pertanyaan/kuisisioner. Nara sumber primer dalam penelitian ini adalah pengurus PPP Cabang (DPC) Kabupaten Tasikmalaya, tokoh PPP, mantan pengurus, anggota dan konstituen partai.

- **Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain, misal dalam bentuk tabel atau diagram-diagram.

#### **4.5. Validitas Data**

Validitas data merupakan faktor yang penting dalam penelitian kualitatif. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui validitas data. Dalam penelitian ini digunakan triangulasi data yaitu data sumber. Model ini berarti suatu model validitas data yang diperoleh dan dibandingkan dengan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif yang menurut Patton (dalam Moleong, 1990 : 178) model ini dapat diperoleh dengan jalan:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan pandangan orang seperti orang biasa, orang berpendidikan, orang berada dan orang pemerintahan.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Penelitian ini dalam memperoleh keabsahan data juga digunakan triangulasi data yang merupakan teknik pemeriksaan mengenai keabsahan data yang memanfaatkan keabsahan yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut (Moleong, 1990:179).

#### **4.6. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini peliputan data akan dilakukan melalui tiga cara yaitu:

- Wawancara mendalam

Wawancara mendalam adalah mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, kelompok, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, kebulatan; mengkonstruksi kebulatan-kebulatan sedemikian rupa sehingga yang dialami masa lalu dapat memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagaimana yang telah diharapkan untuk memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti, sebagian besar dari pengecekan anggota (Lincoln dan Guba dalam Moleong, 1999).

- Observasi

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan upaya pengumpulan data-data yang dilakukan secara sistematis. Disini, peneliti melibatkan diri dan melakukan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas yang sedang berjalan guna memperoleh data yang sebenarnya dan langsung di lapangan.

- Dokumentasi

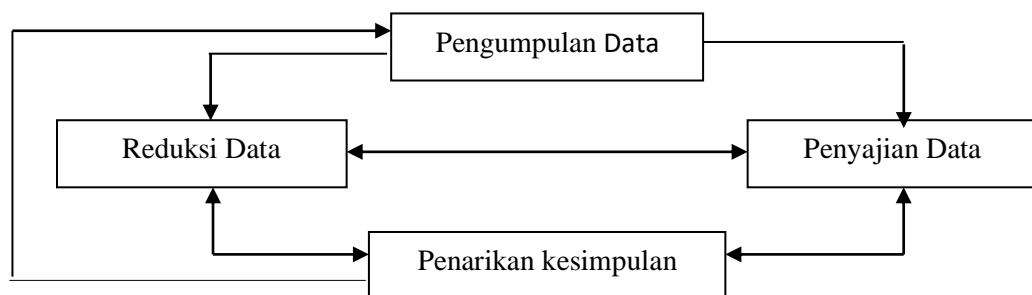
Dokumentasi adalah cara menjaring data sekunder menggunakan buku-buku teks, dokumen-dokumen serta informasi yang terkait.

#### **4.7. Metode Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis interaktif yaitu pada saat proses pengumpulan data peneliti tetap bergerak diantara: reduksi data

(penyeleksian atau penyederhanaan data), penyajian data serta penarikan kesimpulan/verifikasi. Ketiga komponen tersebut, aktivitasnya berbentuk hubungan relasional sebagai siklus. Artinya, setelah pengumpulan data berakhir, peneliti mulai bergerak secara teratur ke reduksi data, kemudian penyajian data serta penarikan kesimpulan, sehingga kesimpulan akhir terjadi.

Apabila peneliti masih merasa belum mantap atas kesimpulannya karena ada kekurangan dalam reduksi data dan penyajian datanya, maka peneliti dapat menggali dalam *fieldnote*. Apabila dalam *fieldnote* tidak ada data yang dimaksud, maka peneliti harus mengadakan pengumpulan data lagi untuk memperoleh analisisnya. Proses analisa interaktif dapat digambarkan melalui skema:



Sumber : Milles dan Huberman, 1992 : 20

### **Gambar 2. Model Analisis Interaktif**

Keterangan Gambar:

- Reduksi data: Sebagai proses pemilahan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data ‘kasar’ yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
- Penyajian data: Sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengamatan tindakan.

- Penarikan kesimpulan/verifikasi: Kegiatan mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola dan penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin. Alur sebab akibat dan proposisi, kemudian mengikat lebih rinci dan mengakar dengan konkret;

## **BAB 5. HASIL PENELITIAN**

### **5.1. Sejarah Perkembangan Partai Persatuan Pembangunan**

#### **5.1.1. Cikal Bakal Partai Persatuan Pembangunan**

Membicarakan salah satu partai Islam tidaklah bisa dilepaskan dari sejarah berdirinya Negara Indonesia. Sedangkan membicarakan sejarah berdirinya Negara Indonesia pula tidak bisa dilepaskan dari pergulatan pemikiran dan gagasan-gagasan politik. Salah satu pemikiran politik yang mewarnai dinamika sejarah bangsa Indonesia adalah pemikiran politik Islam lewat para tokoh Islam pendiri bangsa ini. Pemikiran politik Islam yang dimanifestasikan lewat organisasi pergerakan dengan ideologinya menjadi peta politik tersendiri yang pada akhirnya harus berujung pada sebuah konflik dalam memperebutkan kekuasaan, ideologi negara, sistem negara dan konstitusi negara.

Ketika gerakan politik Islam gagal dalam merealisasikan gagasan-gagasannya dalam lewat jalur politik parlemen pada masa-masa awal proklamasi kemerdekaan, beberapa gerakan ini kemudian bermutasi menjadi sebuah gerakan perlawanan bersenjata yang berujung pada tuntutan pemisahan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setidaknya sejarah mencatat peristiwa besar yang menjadi akumulasi gerakan politik Islam, yaitu peristiwa pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang diproklamlirkan oleh Soekarmadji Maridjan Kartoesowirdjo pada tanggal 7 Agustus 1949 di Tasikmalaya Jawa Barat. Keberhasilan pemerintah Soekarno dalam menumpas gerakan DI/TII ini seolah menjadi sinyal berakhirnya gerakan politik Islam lewat jalur pemberontakan.

Dalam perkembangannya, konsensus mengenai pengakomodasian nilai-nilai Islam dalam konstitusi Negara tercermin dari Falsafah Pancasila dengan nilai kebhinekaan yang tertuang dalam lima sendi khususnya sila pertama, yang berbunyi “Ketuhanan yang maha Esa”. Falsafah Pancasila seolah menjadi obat yang mujarab dalam mengakomodasi khasanah pemikiran politik yang berkembang pasca proklamasi. Cita-cita untuk mendirikan Negara Islam harus kandas ditengah jalan.

Dalam ranah politik parlemen, gerakan politik Islam tidak surut, sebagai manifestasi yang memperjuangkan tegaknya nilai-nilai Islam. Salah satu partai dengan gagasan Islam yang paling besar adalah Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) dalam naungan sistem Parlemerter. Walaupun pada akhirnya nasib Masyumi juga kandas ditengah jalan sebagai akibat dituduhnya elite-elite politik Masyumi terlibat gerakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (Permesta).

Setelah kekuasaan Soekarno runtuh, Rezim Orde Baru mencoba melakukan pendekatan dengan kalangan-kalangan Islam, salah satunya dengan merehabilitasi tokoh-tokoh Masyumi dan diperbolehkan aktif dalam politik dengan meleburkannya ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Di sinilah, pola perjuangan gerakan Islam mulai mengalami perubahan, atau bisa dikatakan dipaksa berubah dan mau tidak mau harus mengakomodasikan paradigma perjuangannya sesuai dengan agenda politik orde baru. Ini bisa dipahami sebagai akibat menguatnya struktur dan infrastruktur politik yang dibangun oleh rezim orde baru pimpinan Soeharto. Bahkan pada perkembangannya di tingkat pusat

gerakan perjuangan Politik Islam hanya sebatas etalase politik yang pada ujungnya terlihat sebagai politisasi gerakan politik Islam oleh Rezim Orde Baru.

### **5.1.2. Terbentuknya Partai Persatuan Pembangunan (PPP)**

Ditingkat bawah, hasrat dalam memperjuangkan nilai-nilai Islam lewat jalur politik parlemen tidak surut, apalagi setelah Orde Baru pada tahun 1973 melakukan penyederhanaan partai politik menjadi tiga partai (Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Secara ideologis, pembagian pemilih terbagi menjadi tiga, yakni pemilih ideologis Islam yang mewakili PPP, pemilih ideologis Pancasila yang mewakili Golkar dan pemilih ideologis nasionalis sekuler yang mewakili PDI.

Pada fase ini, pendongkrak suara PPP tidak bisa dilepaskan dari peran para tokoh Ulama yang menjadi corong gerakan politik PPP dalam meraup suara. Ulama dan santri menjadi ujung tombak ditataran akar rumput dalam menyebarkan jargon-jargon Islam sebagai cara merebut simpati pemilih. Kehadiran tokoh-tokoh ulama dalam kancah politik praktis pada masa orde baru menjadi sebuah gambaran bahwa harapan untuk menanamkan nilai-nilai Islam dalam ranah sebuah hukum Negara (syariat) masih besar. Kehadiran tokoh-tokoh Ulama yang berdiri dalam barisan PPP menjadi faktor pendukung terbesar sehingga PPP dalam setiap Pemilu, PPP memperoleh suara kedua terbesar setelah Golkar.

Kehadiran ulama dalam politik praktis pada masa Orde Baru masih didasari atas besarnya hasrat tokoh-tokoh Ulama dalam mengusung cita-cita

penegakan syariat Islam, sehingga bisa dikatakan keikutsertaannya dalam politik praktis sebagai manifestasi perjuangan gerakan politik Islam yang diestafetkan kepada mereka oleh para pendahulunya. Orientasi gerakan politik ulama pada waktu itu tidak semata-mata meraih kekuasaan politik.

### **5.1.3. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kabupaten Tasikmalaya**

Kabupaten Tasikmalaya adalah salah satu wilayah sebagai pendulang suara bagi PPP. Fakta tersebut tidak mengherankan, karena Kabupaten Tasikmalaya memiliki identitas sebagai wilayah yang kental akan nilai-nilai Islam. Nuansa Islam yang menjadi identitas kabupaten Tasikmalaya tercermin dari banyaknya tokoh-tokoh ulama yang berpengaruh dan berdirinya ratusan pesantren.

Selain itu juga, Isu-isu penegakan nilai-nilai Islam yang disponsori oleh PPP menjadi isu yang laris di Kabupaten Tasikmalaya, hal ini kemudian ditopang dengan aktivitas politik para Ulama di Kabupaten Tasikmalaya berlabel atribut PPP yang seiring sejalan dengan agenda isu penegakan nilai-nilai Islam. Kabupaten Tasikmalaya menjadi “lambung” suara bagi PPP tidak dilepaskan dari massifnya gerakan politik Ulama didukung dengan kultur masyarakatnya yang religius dengan orientasi perjuangan sebagai jalan mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam lingkup negara.

Pasca Reformasi, seiring dengan diimplementasikan otonomi daerah dengan mekanisme pemilihan kepala daerah langsung dan bermunculannya partai baru, termasuk partai Islam, identitas politik ulama terpecah ke beberapa partai

politik. Partai politik yang menjadi ajang hijrahnya para ulama di Kabupaten Tasikmalaya diantaranya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Bintang Reformasi (PBR) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Perubahan arah politik ini di atas, tentunya berpengaruh terhadap peta politik khususnya peta politik ulama di kabupaten Tasikmalaya, hal ini secara otomatis juga merubah pandangan politik ditingkat akar rumput. Persaingan para ulama dalam perahu partainya masing-masing ini memunculkan sebuah fenomena baru, yaitu semakin ketatnya persaingan dalam merebut pemilih "Islam" di kabupaten Tasikmalaya dan terpecahnya kekuatan partai Islam. Yang lebih ironis lagi adalah terjadinya perubahan orientasi gerakan politik ulama kearah yang lebih pragmatis. Pada masa kekuatan politik Islam masih berada dalam satu partai PPP, gerakan politik Ulama lebih didasarkan pada faktor ideologis kegamaan yang berkuat pada isu-isu ke-Islaman dan beroreintasi pada penerapan syariat Islam.

Faktor ideologis yang menempatkan Islam sebagai ideologi partai menempatkan PPP sebagai partai dominan yang menempati urutan terbesar di Kabupaten Tasikmalaya. Pengaruh ideologi Islam PPP tidak terlepas dari sosio-kultural masyarakat kabupaten Tasikmalaya yang religius-Islami. lahirnya ulama-ulama kharismatik yang memimpin pondok-pondok pesantren di Kabupaten Tasikmalaya, menempatkan PPP sebagai partai yang paling memikat hati masyarakat kabupaten Tasikmalaya, relasi antara sosio-kultural dan ideologi islam dalam partai-partai Islam mempengaruhi sosio-politik di Kabupaten Tasikmalaya,

sehingga isu-isu keislaman yang diusung partai-partai Islam di Kabupaten Tasikmalaya menjadi isu politik yang paling banyak diminati.

Pasca Reformasi dimana jumlah partai politik diperbanyak, situasi sosio-politik di Kabupaten Tasikmalaya tidak banyak berubah, dimana partai-partai Islam masih menjadi partai dominan yang mempengaruhi isu-isu keislaman dimana ketokohan ulama menjadi lokomotif penggerak masa ditataran akar rumput. Pasca Reformasi kekuatan partai Islam terpecah menjadi dua kekuatan besar, yakni PPP dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Secara tidak langsung pecahnya kekuatan partai Islam membuat pecahnya keberpihakan politik para ulama kharismatik. Dukungan secara tradisional dan secara formal, yakni masuknya beberapa tokoh ulama menjadi elite partai politik, menambah dinamika wacana-wacana politik yang mengusung isu-isu keislaman.

Populernya isu-isu dan wacana-wacana politik keislaman di Kabupaten Tasikmalaya, menempatkan posisi ulama sebagai sentral yang dapat mengumpulkan dukungan politik dari akar rumput. Peta dukungan politik yang selama dibangun di tataran akar rumput kepada ulama terutama disandarkan pada satu harapan tentang kondisi yang ideal mengenai implementasi kebijakan yang mengadopsi nilai-nilai Islami dalam membangun pemerintahan di Kabupaten Tasikmalaya.

Citra yang selama ini dikembangkan oleh tokoh-tokoh ulama dengan kendaraan politiknya masing-masing membawa pesan dan harapan akan lahirnya nilai-nilai ideal implementasi kebijakan yang bernuansakan syariat Islam. Hal ini direspon oleh masyarakat sebagai kendaraan dan konsolidasi kekuatan untuk

menciptakan nuansa Islami yang berlandaskan nilai-nilai syariat di Kabupaten Tasikmalaya.

Ada fenomena yang berbeda khususnya pasca Reformasi, dimana kekuatan partai-partai Islam terpecah menjadi beberapa kekuatan, dan dukungan tradisional dan formal dari tokoh-tokoh ulama di Kabupaten Tasikmalaya ikut terpecah. Fenomena munculnya ketidakpercayaan masyarakat yang selama ini membangun relasi dukungan ideologis dan relasi politis kepada para ulama kharismatik yang menggerakkan kendaraan partai Islam. Ketidakpercayaan tersebut menyangkut eksistensi gerakan politik ulama yang sudah tidak konsisten memperjuangkan nilai-nilai syariat Islam dalam panggung politik. Masyarakat kini menilai bahwa gerakan politik ulama lewat masing-masing partai Islam sudah tidak memiliki militansi yang kuat terhadap komitmen keislaman di Kabupaten Tasikmalaya, walaupun masih ada hanya sebatas jargon-jargon politis untuk meraih kalangan pemilih ideologis dan tradisional. Keadaan seperti ini menempatkan partai-partai Islam sebagai partai yang dipandang tidak lagi memiliki nilai-nilai ideologis ke-Islaman. Pragmatisme peran ulama dalam politik praktis menambah kesan bahwa partai Islam secara umum hanya dipahamai sebagai alat atau kendaraan untuk menduduki jabatan-jabatan politik bagi para elite politik dari kalangan ulama tanpa adanya militansi dan komitmen yang kuat akan tegaknya nilai-nilai syariat.

Secara langsung, fenomena seperti menempatkan ulama sebagai aktor politik yang awalnya dipercaya sebagai lokomotif gerakan politik Islam di Kabupaten Tasikmalaya, menjadi aktor politik yang dianggap tidak memiliki visi

dan misi keislaman. Gerakan politik ulama sudah dianggap sebagai gerakan politik yang tidak ideologis dan terkesan hanya mementingkan kepentingan politik pribadi dan golongan elite partai. Ada semacam perubahan orientasi gerakan politik ulama yang tadinya berorientasi ideologis menjadi berorientasi pragmatis.

Posisi Partai Persatuan Pembangunan saat ini mewujud menjadi kekuatan yang sulit untuk digantikan. Partai yang di masa Orde Baru hanyalah partai pelengkap kini menguasai jabatan strategis, baik di Kota maupun Kabupaten Tasikmalaya. Di Kabupaten Tasikmalaya partai ini menguasai kursi bupati dan ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Saat ini ketua PPP Kabupaten Tasikmalaya dipimpin oleh H. Ruhimat, M.Pd yang juga menjabat Ketua DPRD masa bakti 2014-2019. Sedangkan Bupati Tasikmalaya H. UU Ruzhanul Ulum sebelumnya menjabat Ketua PPP Kabupaten Tasikmalaya, kini menjabat penjabat sementara ketua DPD PPP Jawa Barat. Begitu juga dengan Kota Tasikmalaya, di mana Wali Kota Tasikmalaya dan Ketua DPRD nya merupakan elit PPP Kota Tasikmalaya.

## **5.2. Institusionalisasi Kepartaian Partai Persatuan Pembangunan**

### **5.2.1. Dimensi *Systemness* Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya**

Mengkaji apa yang dikemukakan oleh Randall dan Svasand (2002) sebagaimana telah direview dalam tinjauan pustaka, bahwa pelembagaan partai politik adalah proses pematapan baik secara struktural dalam rangka mempolakan prilaku maupun secara kulutural dalam mempolakan sikap dan budaya, maka dalam hal peneliti menemukan bahwa dominasi PPP di Kabupaten Tasikmalaya tidak bisa dilepaskan dari warisan eksistensi PPP pada saat rezim orde baru. Artinya secara structural PPP di Kabupaten Tasikmalaya memang sudah mapan, baik secara keorganisasian yang melingkupi kepengengurusan hingga tingkat ranting maupun kemampuan dalam fungsi-fungsi partai politik, yakni komunikasi politik, pendidikan politik dan recruitmen politik, hanya saja karena rezim orde baru yang menggunakan pendekatan otoriterianisme, penggunaan intimidasi, manipulasi dan politisasi birokrasi maka suara ataupun kekuatan PPP di Kabupaten Tasikmalaya tidak bisa mengimbangi kekuatan Golkar pada waktu itu, tetapi secara structural PPP di Kabupaten Tasikmalaya telah siap tempur manakala reformasi yang menjatuhkan kekuasaan Soeharto terjadi<sup>9</sup>.

Karena kesiapan structural tersebut ketika reformasi bergulir, Soeharto lengser dan tuntutan demokratisasi, kebebasan dan tuntutan-tuntutan terhadap hak-hak politik menjadi isu yang menggerakkan kekuatan massa, maka PPP di Kabupaten Tasikmalaya tampil sebagai partai yang banyak merebut simpati

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Asop Sopiudin, anggota Fraksi PPP Kabupaten Tasikmalaya

masyarakat Tasikmalaya. PPP berhasil meraih simpati masyarakat dengan menggambarkan dirinya sebagai partai yang “terdzholimi” oleh penguasa Orde Baru. Isu “terdzholimi” ini yang dibungkus dengan wacana-wacana, gagasan-gagasan dan isu-isu ke-Islaman menjadikan PPP di Kabupaten Tasikmalaya menjadi partai dominan pasca reformasi.

Kemapanan secara structural tersebut kemudian didukung oleh faktor kultural yang menempatkan PPP sebagai partai dominan di Kabupaten Tasikmalaya. Secara sosiologis, Tasikmalaya memiliki identitas ke-Islaman yang sangat kental, memiliki basis pesantren yang tersebar hampir disetiap kecamatan yang kemudian melahirkan ulama-ulama kharismatik yang disegani sekaligus sangat dipatuhi, dan banyak ulama kemudian menjadi aktivis Partai, atau eksistensinya mewakili kepentingan PPP. Keterkaitan antara faktor sosiologis akan identitas Tasikmalaya sebagai kota penuh nuansa ke-Islaman dengan berdirinya PPP sebagai partai “hijau”, memiliki simbol ke-Islaman, *platform*, visi-misi tujuan-tujuan ke-Islaman membuat PPP diyakini sebagai partai yang mewakili suara umat Islam. Jadi antara faktor structural dan kultural akan dominasi PPP di Kabupaten Tasikmalaya tidak terlepas dari dua pertautan tersebut, antara faktor structural dan faktor kultural sama-sama saling mengisi, mempengaruhi satu sama lain, dan tidak bisa dikatakan mana yang lahir duluan.

Dari dua elemen yang saling mengisi tersebut maka setelah reformasi PPP di Kabupaten Tasikmalaya mampu mendominasi dengan dua kali berturut-turut mengisi jabatan Bupati dan menjadi fraksi mayoritas di DPRD. Walaupun setelah reformasi banyak partai Islam bermunculan, yang sama-sama memiliki konsep

perjuangan ke-Islaman bahkan suara Nahdhatul Ulama (NU) yang menjadi organisasi Islam *mainstream* di Kabupaten Tasikmalaya terpecah, karena pada waktu itu lahir Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai representasi suara kalangan Nahdiyin (warga NU), tetapi PPP di Kabupaten Tasikmalaya tetap menjadi partai dominan. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa secara structural PPP telah siap dalam menyikapi perubahan sosial, yakni tuntutan reformasi yang kemudian didukung oleh faktor kultural. Bahkan Asop Sopiudin<sup>10</sup> mengatakan kultur-lah yang membesarkan PPP di Kabupaten Tasikmalaya.

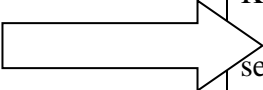
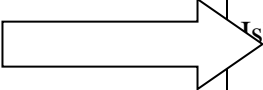
Secara struktural adanya relasi dengan pesantren dan sosok Ulama itu sendiri membuat PPP di Kabupaten Tasikmalaya memiliki ruang-ruang pengkaderan “warisan” yang secara turun-temurun menjadi basis suara PPP. Adalah pesantren Miftahul Huda yang dulu didirikan oleh Almarhum KH. Khoer Affandi, sosok ulama yang vokal terhadap pemerintah Orde Baru yang kemudian berdiri secara struktural dalam kepengurusan PPP. Beberapa kali pernah berurusan dengan aparat karena kritis dan berada pada garda terdepan eksistensi PPP di Kabupaten Tasikmalaya. Setelah Orde Baru tumbang dan Ua Ajengan, sebutan bagi KH. Khoer Affandi wafat, amanat Ua Ajengan untuk terus meneruskan “perjuangan” dalam bentuk dukungan dan militansi kepada partai terus dipelihara, sehingga memunculkan mitos yang secara kultural menjadi sarana “rekrutmen” simpatisan fanatik, yakni adanya ungkapan “kualat” bila tidak mematuhi amanat Ua Ajengan. Bisa dibayangkan berapa ribu santri dari berbagai angkatan yang tidak sedikit kemudian antara santriwan dan santriwati

---

<sup>10</sup> Anggota Fraksi PPP DPRD Kabupaten Tasikmalaya periode 1999-2004. 2004-2009, 2014-2019

dijodohkan (*ta'aruf*) kemudian menikah, melahirkan keturunan dari “doktrin” dan ideologi politik yang sama dengan mitologi “kualat”. Maka dalam hal ini Himpunan Alumni Miftahul Huda (Hamida) bisa dikatakan sebagai organisasi yang mendulang suara untuk PPP, dan salah satu penyumbang suara terbesar yang mengantarkan H. Uu Ruzhanul Ulum menjadi Bupati sebagai bagian dari keluarga pesantren Miftahul Huda adalah dukungan Hamida.

Bila menggunakan Metriks dimensi-dimensi institusionalisasi kepartaian dari Randall dan Svasand, maka akan tergambar dimensi institusionalisasi PPP di Kabupaten Tasikmalaya sebagai berikut :

<b>Struktural</b>	<b>Internal</b>	<b>Eksternal</b>
	Kesisteman : Mapan secara Organisasi dan fungsi-fungsi Partai Politik pra dan pasca reformasi	Otonomi : Relasi dengan pesantren dan Ulama dalam membentuk fanatisme pendukungnya
<b>Kultural</b> 	Identitas Nilai : Ke- Islaman	Citra Publik : kepercayaan besar terhadap wacana- wacana ke-Islaman dan politik simbol ke-Islaman yang diusung PPP

## **5.2.2. Dimensi *Reification* Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya**

Pembahasan ini meliputi bahasan tentang politik pencitaan Partai Persatuan Pembangunan, dari Partai Gurem menuju Partai Penguasa, dan aksi-aksi nyata Partai Persatuan Pembangunan lewat kebijakan publik yang populis. Untuk lebih jelasnya kita lihat dalam kajian-kajian di bawah ini.

### **5.2.2.1. Dari Partai “Gurem” menuju Partai Penguasa**

Upaya perbaikan citra (*reification*) yang pertama kali dilakukan pasca Reformasi adalah berusaha mengubah image public bahwa Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah partai pelengkap (gurem) di masa Orde Baru. Menurut informan (Ruhimat, Ketua PPP Kabupaten Tasikmalaya saat ini), para elit PPP saat itu berusaha mengubah *image* tersebut. Walaupun Tasikmalaya memiliki sosio-kultural Kota Santri dan dikenal sebagai basis PPP, namun jika dibandingkan Golkar, PPP di masa Orba tetap sebagai partai Gurem. Partai ini hanya unggul di pedesaan-pedesaan Tasikmalaya. Upaya perubahan *image* tersebut bukanlah tanpa maksud tertentu untuk hal-hal yang lebih strategis ke depannya terkait dengan popularitas dalam memenangkan pemilu dan menguasai pemerintahan, yang sebelumnya terus-menerus di kuasai oleh Golkar dan militer.

Konstelasi politik pasca jatuhnya Orde Baru sangat mendukung bagi PPP dalam merubah image tersebut di atas. Paling tidak ada beberapa hal yang dilakukan untuk merubah citra partai “gurem” di masa Orde Baru, khusus konteks di Tasikmalaya sebagaimana diinformasikan oleh informan UU Ruzhanul Ulum

(Mantan ketua PPP, Bupati Tasikmalaya sekarang). *Pertama*, PPP saat itu berupaya mencitrakan sebagai partainya “orang-orang Nahdatul ‘Ulama (NU). Upaya ini didasari bahwa Tasikmalaya merupakan wilayah di Jawa Barat yang sebagian besar masyarakatnya pengikut Organisasi Nahdatul Ulama. Oleh karena itu, upaya pencitraan dengan melekatkan *image* PPP sebagai partainya Orang NU dianggap sebagai langkah tepat untuk meraih simpati masyarakat dalam memenangkan kontestasi melalui Pemilu Legislatif tahun 1999. Hal ini terbukti dengan kemenangan PPP sebagai partai yang mampu menempatkan wakilnya terbanyak di legislatif dan menempatkan elit partainya saat itu, yakni Tatang Farhanul Hakim sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya periode 1999-2004. Sedangkan untuk pemimpin eksekutif, Bupati masih dipegang oleh Golkar dengan latar belakang militer yakni H. Sulyana WH yang memimpin Tasikmalaya sejak 1996-2001. Namun pada pemilihan 5 tahun berikutnya yakni tahun 2001 Tatang Farhanul Hakim justru mampu menyisihkan H.Sulyana Wirahadi Subarata sebagai Bupati Tasikmalaya periode 2001-2006 lewat pemilihan oleh Anggota DPRD, sehingga jabatan Ketua DPRD ditinggalkannya. Tatang Farhanul Hakim kemudian terpilih kembali lewat Pemilihan Kepala Daerah Langsung yang pertama kali oleh rakyat sebagai Bupati Kabupaten Tasikmalaya periode 2006-2011 (Kota Tasikmalaya telah menjadi Daerah Otonom Baru). Pusat pemerintahan kemudian dipindahkannya ke Singaparna, kawasan Gunung Koneng Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Dalam konteks ini perlu dipahami bahwa kita semua mengetahui PPP sesungguhnya bukanlah partai milih Nahdatul Ulama (NU) saja, bahkan di masa-

masa awal pergerakan Indonesia tokoh-tokoh yang membidani PPP merupakan tokoh-tokoh yang dulunya menghidupkan Masyumi. Tetapi pencitraan yang dilakukan di Tasikmalaya, khususnya pasca Reformasi (di masa Tatang Farhanul Hakim berkuasa) dengan mendekati NU sangatlah efektif dan hal tersebut berhasil menjadikan PPP “seolah-olah” partainya Orang NU di masa itu.

Tatang Farhanul Hakim merupakan tokoh sentral di masa periode ini, sebagai ketua PPP Kabupaten Tasikmalaya, dan juga sebagai Bupati beliau dianggap memiliki karakter kepemimpinan yang kuat dalam menguasai Birokrasi Pemerintahan dan menginternalisasi nilai-nilai PPP ke semua stafnya. Di masanya ini PPP mewujud menjadi partai penguasa. Partai yang disegani peraih kursi terbanyak di parlemen Kabupaten di pemilu 2004 yakni 12 kursi. Beliau juga merupakan salah seorang tokoh sentral dari organisasi Nahdatul Ulama, sehingga tidak heran jika konstituen PPP banyak tersebar di kalangan Nadhatul Ulama. Walaupun ada PKB pasca Reformasi, tidak dengan serta merta PPP ditinggalkan oleh pengikut NU. Bahkan dapat dikatakan sebagian besar warga Naddiyin menjadi konstituen PPP. Sehingga pantaslah jika PPP menjadi pemenang dalam Pemilu Legislatif tahun 2004, pemenang Pilkada Tahun 2001, dan Pemenang Pemilukada Tahun 2006.

*Kedua*, upaya membangun citra positif Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga dilakukan melalui pendekatan kalangan elit politik PPP melalui pesantren. Elit-elit PPP generasi awal Reformasi seperti Tatang Farhanul Hakim, UU Ruzhanul ‘Ulum, H. Ruhimat dan lainnya merupakan tokoh-tokoh yang lekat dengan pesantren. Tatang dikenal sebagai orang pesantren yang kemudian

menjadi politisi PPP. Keluarga besarnya merupakan tokoh dan pendiri di beberapa pesantren besar di Tasikmalaya, seperti Sukahideng dan Cipasung. Sedangkan UU Ruzhanul 'ulum merupakan salah satu pimpinan Pondok Pesantren terbesar di Tasikmalaya, yakni Pondok Pesantren Miftahul Huda, Manonjaya. Beliau merupakan cucu pendiri pesantren tersebut (KH. Khoer Affandi). Dalam peta politik di Kabupaten Tasikmalaya, bahkan di Tasikmalaya secara umum banyak dikuasai oleh 3 pesantren besar tersebut, yakni Miftahul Huda, Cipasung dan Sukahideng-Sukamanah Tasikmalaya.

Pendekatan-pendekatan tersebut jelaslah sangat efektif, karena para santri dan keluarganya tentunya memiliki simpati dan bahkan dalam banyak hal menjadi konstituen dari PPP itu sendiri. Sebagai pengajar dan pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) tokoh-tokoh tersebut dapat dengan mudah memberikan himbauan dan ajakan untuk bergabung dengan PPP yang mereka pimpin. Jumlah santri ribuan cukup efektif untuk mensosialisasikan PPP ke masyarakat. Apalagi pesantren-pesantren besar tersebut memiliki ikatan alumni yang fanatik dan solid yang dapat dijadikan agen untuk mensosialisasikan PPP, seperti Hamida untuk Alumni Ponpes Miftahul Huda.

Reifikasi yang dilakukan oleh petinggi-petinggi Partai Persatuan Pembangunan tersebut pada gilirannya mampu memenangkan Pemilu Legislatif tahun 2009 mempertahankan prestasi Pemilu Legislatif Tahun 2004 dengan perolehan kursi terbanyak di DPRD Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 12 kursi (24 persen kursi parlemen). Citra sebagai partainya kalangan pesantren juga didegung-degungkan UU Ruzhanul Ulum ketika berkampanye untuk menuju Z 1

(calon Bupati bersama pasangannya, Ade Sugianto) di tahun 2011. Ade Sugianto merupakan ketua PDI P Kabupaten Tasikmalaya yang merupakan keturunan pesantren. Keduanya kemudian mampu memenangkan kontestasi akbar tersebut dan Koalisi PPP-PDI P tersebut mengantarkan UU Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto menjadi Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya periode 2011-2016 menggantikan pendahulunya Tatang Farhanul Hakim dan H.E. Hidayat.

Kondisi politik terkini muncul konflik elit di PPP tingkat pusat dan melahirkan dua kubu kepemimpinan nasional. Sebagai PPP yang secara AD ART menginduk kepada PPP pusat, maka mereka menganggap secara formal tidak menginduk ke kubu manapun. Namun menginduk kepada kubu PPP yang sah secara konstitusional. PPP Kabupaten Tasikmalaya menganggap hal tersebut tidak memberikan dampak yang signifikan bagi kesolidan PPP di daerah. Namun mereka juga berharap segera bersatu kembali dan ada solusi terbaik bagi kepengurusan PPP di tingkat bawah.

#### **5.2.2.2. Pencitraan Lewat Kebijakan di Lembaga Politik**

Citra diri pada publik (*reification*) akan menjadi tidak lengkap ketika hanya berfokus pada citra diri berupa perbaikan kulit partai dan nama baik saja. Ada beberapa yang justru tidak kalah pentingnya dengan hal itu, yakni bagaimana paradigma baru tersebut termanifestasi dalam proses pengambilan kebijakan di lembaga politik seperti parlemen dan kritik yang tajam serta konstruktif terhadap pemerintahan.

Hal yang menggambarkan tentang citra diri lewat peran serta kebijakan di lembaga politik cukup lengkap disampaikan oleh salah seorang tokoh PPP yakni Tatang Farhanul Hakim (mantan Bupati Tasikmalaya, dari PPP), dikatakannya di masa PPP di bawah kepemimpinannya, pejabat sentral Tasikmalaya merupakan elit PPP. Bupati dan ketua DPRD adalah kader PPP, saat itu Tatang Farhanul Hakim sebagai Bupati dan UU Ruzhanul Ulum sebagai Ketua DPRD. Kondisi tersebut berlanjut ke periode berikutnya di masa UU Ruzhanul Ulum sebagai Bupati dan H. Ruhimat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya. H. Ruhimat merupakan Ketua PPP Kabupaten Tasikmalaya saat ini yang menjabat Ketua DPD Kabupaten Tasikmalaya periode 2009-2014 dan 2014-2019. Oleh karena tokoh-tokoh tersebut menduduki tokoh sentral dalam pemerintahan, tentunya memiliki nilai strategis dalam melakukan pencitraan PPP lewat lembaga public tersebut.

Di masa Bupati Tatang Farhanul Hakim, PPP menjelma menjadi partai penguasa yang menguasai seluruh lini pemerintahan. Birokrasi dikuasai dan banyak actor-aktor birokrasi yang menjadi pendukung setia Bupati Tatang, termasuk mendukung PPP lewat berbagai cara. Pada masa inilah fondasi-fondasi PPP sebagai partai besar, disegani, dan paling berkuasa di pancangkan. Berbagai jaringan *patron-client* dibuat, seolah-olah PPP adalah pemilik kekuasaan lokal Tasikmalaya.

Sebagai Bupati, Tatang sangat berhasil membentuk budaya birokrasi baru yang selama puluhan tahun dikuasai Golkar dan militer. Budaya Tasikmalaya yang religious Islami juga muncul di masa pemerintahan Tatang Farhanul Hakim.

Pembangunan-pembangunan mega mercusuar dilaksanakan di masanya, seperti proyek pemindahan pusat ibu kota dan pembangunan seluruh sarana gedung-gedung pemerintahan, jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga), perbaikan alun-alun ibu kota dan mega proyek lainnya yang sampai saat ini masih terus dilanjutkan di masa UU Ruzhanul Ulum.

Kepemimpinan UU Ruzhanul Ulum sebagai Bupati Tasikmalaya dibentuk lewat visi Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa). Lewat Visi Misinya tersebut Bupati UU ingin menegaskan bahwa kepemimpinannya memiliki prioritas pembangunan lewat desa. Hal ini karena dianggapnya desa merupakan ujung tombak pembangunan yang selama ini kurang diperhatikan. Apalagi Tasikmalaya merupakan wilayah yang sangat luas, khususnya wilayah pesedaannya. Tasikmalaya juga merupakan wilayah yang sebagian wilayahnya adalah pedesaan dan bermata pencaharian sebagai petani, baik petani persawahan, perkebunan maupun perikanan. Lewat visi tersebut juga beliau ingin mengesankan sesungguhnya PPP adalah partainya orang desa, sehingga desalah yang harus diprioritaskan dalam pembangunan. Walaupun ternyata dirasakan masyarakat saat ini Gerbang Desa lebih kepada jargon semata, karena kurang dalam aplikasinya.

Di masa pemerintahan UU Ruzhanul Ulum memang sempat ada gejala yang sempat menggoyang pemerintahannya, seperti isu pasir besi, terbengkalainya berbagai pembangunan yang sudah dirintis sebelumnya, dan yang terakhir adalah isu biaya perjalanan dinas yang tidak rasional. Namun hal tersebut dapat diredamnya lewat kesolidan basis dukungan PPP, khususnya dari pesantren.

Berbagai kebijakan populis misalnya penutupan mini market illegal, moratorium eksploitasi pasir besi, kondusifitas hajatan Pemilu, pembangunan sarana pemerintahan, dan yang salut adalah penyelesaian total sengketa asset dengan Kota Tasikmalaya yang sudah puluhan tahun terbengkalai. Beberapa prestasi tersebut memang dinilai banyak kalangan belum sebanding dengan kepemimpinan di masa Tatang Farhanul Hakim, bahkan PPP dinilai saat ini tidak memiliki bargaining-position yang baik di mata partai lain. Bukti tersebut misalnya dengan tidak dapat jatahnya kursi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPRD Kabupaten Tasikmalaya periode 2014-2019. Satu-satunya jabatan yang didapat PPP sebagai pemenang Pemilu Legislatif 2014 adalah Jabatan Ketua DPRD. Walaupun demikian secara umum PPP Kabupaten Tasikmalaya relative kuat dan berkuasa saat ini, yang salah satunya adalah peran dari UU Ruzhanul Ulum sebagai kepala daerah.

#### **4.2.2.3. Analisis Atas *Reification* PPP Kabupaten Tasikmalaya**

Citra publik merupakan situasi yang mampu mengangkat nilai kesetiaan konstituen dalam memberikan dukungannya, disamping itu untuk menguji derajat pengetahuan publik baik yang akan mempengaruhi aspirasi, sikap, prilaku bahkan imajinasi publik terhadap partai politik (Randall dan Svasand, 2002). Dalam pendekatan *Systemness* untuk menjawab pertanyaan mengenai eksistensi PPP di Kabupaten Tasikmalaya, seperti yang telah dijelaskan bahwa pertautan antara kemapanan sistem, baik secara organisasi maupun fungsi-fungsi partai politik pra dan pasca Reformasi, juga faktor struktural mengenai sosio-kultur yang

mempengaruhi sosio-politik, di mana identitas dan nuansa ke-Islaman yang kental, sehingga mempengaruhi cara berpikir dan orientasi politik masyarakat Kabupaten Tasikmalaya, maka dalam mencari derajat citra publik ini penulis menemukan pengaruh secara kultural juga merupakan faktor yang signifikan dalam menentukan besarnya citra publik PPP di Kabupaten Tasikmalaya yang akan menentukan derajat pengetahuan publik bahkan imaji publik terhadap PPP di Kabupaten Tasikmalaya.

Faktor kultural tersebut menjadi pembentuk dan kemudian memapankan ideologi partai ditengah-tengah masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Citra yang terbentuk saling berkelindan antara ke-Islaman dalam dimensi pendidikan (pesantren), ke-Islaman dalam dimensi kultur yakni salah satunya dengan mendekati salah satu Ormas terbesar di Indonesia dan juga di Tasikmalaya yakni Nadhatul Ulama, cara berpikir, termasuk eksistensi ke-kharismaan sosok ulama yang ditaati, dan kemudian mempengaruhi dalam ke-Islaman dalam dimensi politik, yang menentukan orientasi politik masyarakat Tasikmalaya yang pada akhirnya merancang bangun ideologi politik, baik yang melekat dalam individu dan kemudian menjadi kolektif. Inilah relasi-relasi yang terbentuk mengenai citra publik terhadap eksistensi PPP di Kabupaten Tasikmalaya. Artinya ketika berbicara citra PPP, maka sekaligus berbicara tentang konsepsi ke-Islaman, nilai-nilai religiusitas dan harapan mengenai implementasi nilai-nilai ke-Islaman, baik secara sosiologis maupun politis bahkan formalistis dalam wujud kebijakan pemerintah daerah.

Isu-isu, wacana-wacana atau gagasan-gagasan bahkan simbol-simbol politik ke-Islaman merupakan fondasi yang membuat infra-struktur dan supra-struktur PPP di Kabupaten Tasikmalaya kokoh, bahkan menurut Asop Sopiudin<sup>11</sup>, selama PPP masih menggunakan gambar Ka'bah, maka sampai kapanpun masyarakat dan konstituen akan punya harapan besar terhadap cita-cita ke-Islaman di Kabupaten Tasikmalaya.

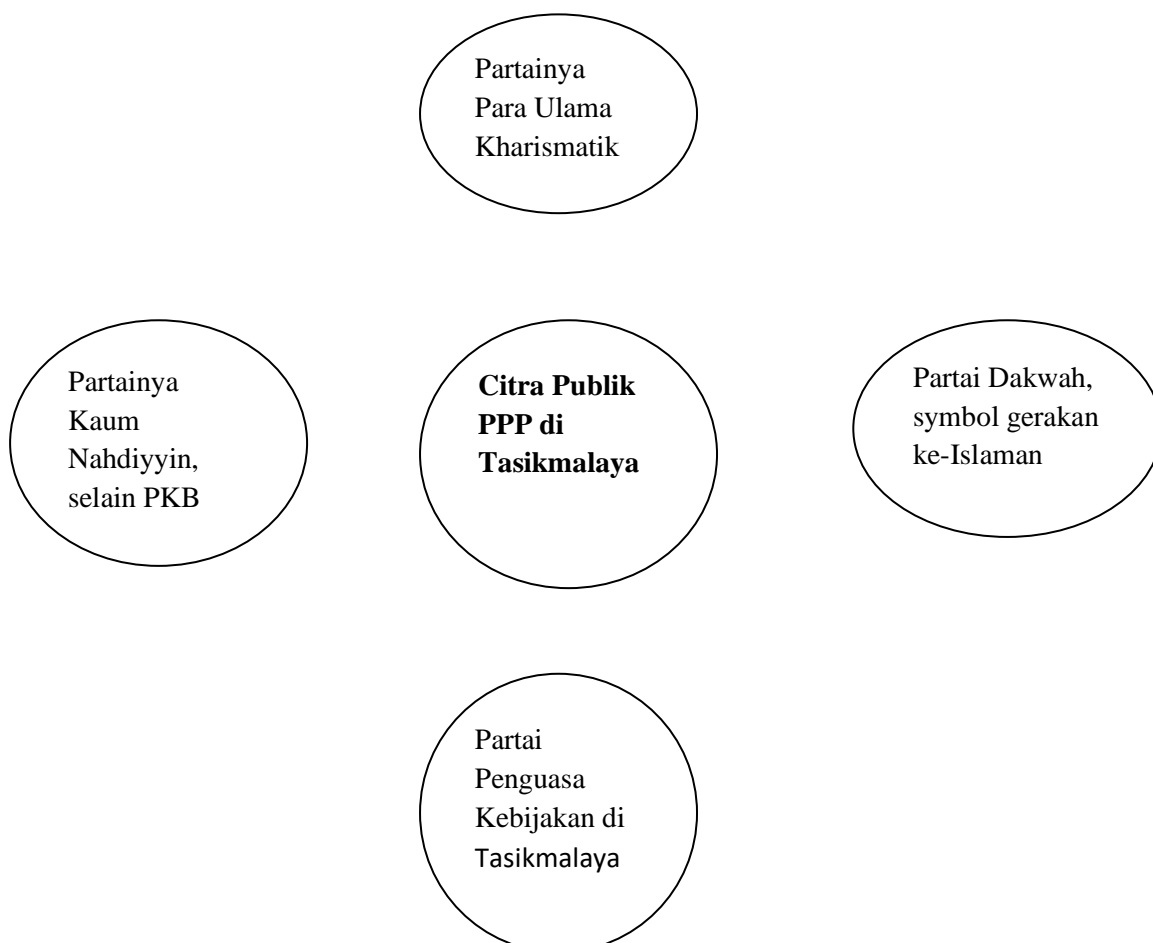
Dakwah agama juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya menjaga citra publik, karena dalam konteks eksistensi partai, dakwah mempunyai dua fungsi, pertama sebagai media penyampai pesan, ajaran dan kebenaran agama sekaligus sebagai media sosialisasi partai, sehingga dakwah merupakan investasi politik yang mendulang citra positif partai. Dalam ruang-ruang inilah publik mengenali citra PPP sebagai partai yang merepresentasikan umat Islam. Bayangan atau imajinasi publik dan konstituen partai ketika berbicara PPP adalah, gerbong suara umat Islam, kendaraan perjuangan umat Islam dan rumah besar umat Islam. Inilah gambaran citra publik PPP di Kabupaten Tasikmalaya.

Relasi yang kedua dalam membentuk citra partai juga pengetahuan dan imajinasi publik tentang PPP adalah adanya figur atau ketokohan Ulama, baik ulama yang langsung menjadi politisi yang punya jabatan struktural di PPP maupun ulama yang tidak aktif dalam kepengurusan partai tetapi mempunyai dukungan secara politis kepada PPP. Keberadaan ulama yang ke-Islamannya dalam dimensi pendidikan (pesantren) maupun ke-Islaman dalam dimensi kultur, cara berpikir, termasuk eksistensi ke-kharismaan sosok ulama yang menempatkan

---

<sup>11</sup> Anggota Fraksi PPP DPRD Kabupaten Tasikmalaya periode 1999-2004. 2004-2009, 2014-2019

ulama sebagai sosok penuh dengan nilai-nilai religiusitas yang harus dipatuhi, digugu dan ditiru, maka dalam hal ini ketika ke-kharismaan Ulama tersebut melekat unsur-unsur ataupun atribut-atribut partai, maka dengan sendirinya citra Ulama dengan segala ke-Kharismaan akan melekaat sebagai citra partai yang penuh nuansa religiusitas. Maka selama ruang-ruang kultural akan nilai-nilai ke-Islaman dalam sosio-kultur masyarakat Kabupaten Tasikmalaya masih kuat, ke-kharismaan sosok Ulama masih kental dalam mempengaruhi pikiran publik, maka secara politik kekuatan PPP akan tetap mendominasi, karena secara politik simbol, PPP “mengelola” situasi kebatinan religi masyarakat Tasikmalaya, sehingga isu-isu ke-Islaman menjadi “modal” politik PPP di Kabupaten Tasikmalaya untuk mempertahankan dominasi politiknya. Hal tersebut secara konseptual dapat digambarkan sebagai berikut :



## **BAB 5. KESIMPULAN**

Relasi yang dibentuk partai dan juga pengetahuan imajinasi publik tentang PPP adalah adanya figur atau ketokohan Ulama, baik ulama yang langsung menjadi politisi yang punya jabatan struktural di PPP maupun ulama yang tidak aktif dalam kepengurusan partai tetapi mempunyai dukungan secara politis kepada PPP. Keberadaan ulama yang ke-Islamannya dalam dimensi pendidikan (pesantren) maupun ke-Islaman dalam dimensi kultur, cara berpikir, termasuk eksistensi ke-kharismaan sosok ulama yang menempatkan ulama sebagai sosok penuh dengan nilai-nilai religiusitas yang harus dipatuhi, digugu dan ditiru, maka dalam hal ini ketika ke-kharismaan Ulama tersebut melekat unsur-unsur ataupun atribut-atribut partai, maka dengan sendirinya citra Ulama dengan segala ke-kharismaan akan melekaat sebagai citra partai yang penuh nuansa religiusitas. Maka selama ruang-ruang kultural akan nilai-nilai ke-Islaman dalam sosio-kultur masyarakat Kabupaten Tasikmalaya masih kuat, ke-kharismaan sosok Ulama masih kental dalam mempengaruhi pikiran publik, maka secara politik kekuatan PPP akan tetap mendominasi, karena secara politik simbol, PPP “mengelola” situasi kebatinan religi masyarakat Tasikmalaya, sehingga isu-isu ke-Islaman menjadi “modal” politik PPP di Kabupaten Tasikmalaya untuk mempertahankan dominasi politiknya.

## DAFTAR PUSTAKA

La Palombara, Joseph dan Myron Weiner (1966) dalam bukunya *Political Parties and Political Development*, Princeton University Press.

Moleong, L. J, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung.

Pamungkas, Sigit, 2009, *Perihal Pemilu*, Laboratorium Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan UGM, Cet I, Yogyakarta.

Randall, Vicky dan Lars Svasand (2002), *Party Institutionalization in New Democracies, Party Politics*, Vol.8 No.1, Sage Publication, London.

Romli, Lili dkk, 2003, *Potret Partai Politik Pasca Orde Baru*, P2P-LIPI, Jakarta.

Salim HS, dkk, 1999, *Tujuh Mesin Pendulang Suara : Perkenalan, Prediksi dan Harapan Pemilu 1999*, LKiS, Yogyakarta.

Tandjung, Akbar, 2007, *The Golkar Way : Survival Partai Golkar dalam Turbulensi Politik Era Transisi*, Gramedia, Jakarta.

Tomsa, Dirk (2008), *Party Politics and Democratization in Indonesia : Golkar in The Post- Soeharto Era*, Routledge, London and Newyork.

### Sumber Lain :

PKS Jakarta Selatan, 2004, tersedia <http://www.pks-jaksel.or.id/Article128.html>, *Hasil Poling LSI : Suara Golkar dan PKS Diperkirakan Naik pada Pemilu 2004*, dilihat 21 Maret 2014.

Situs Resmi Golkar, 2014, tersedia di <http://www.Golkar.or.id/index.php?op=profil>, dilihat 15 Juli 2014.

Vicky Randall dan Lars Svasand (2002), *Party Institutionalization in New Democracies, Party Politics*, Vol.8 No.1, Sage Publication, London, hal 5-29, tersedia di <http://ppq.sagepub.com>, dilihat 15 Januari 2013.

